

Kepahlawanan Perempuan

Hendra Kurniawan

perempuan saat ini diberi kesempatan yang lebih tegas terkait dengan hak dan kewajibannya dalam bidang politik sehingga diharapkan dapat semakin berperan bagi negara.

Perempuan Dalam Sejarah

Sekalipun jumlahnya minim, tak berarti perempuan yang terlibat dan berkontribusi bagi negara ini begitu terbatas. Ada banyak peran perempuan sejak masa perjuangan hingga saatnya mengisi kemerdekaan tiba. Persoalannya sejauhmana sejarah mampu menggal-



KR-JOKO SANTOSO

lebih lanjut peran perempuan dalam perjalanan hidup bangsa ini. Lebih penting lagi yaitu perlunya mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan yang masih sering dilettakkan sebagai objek dan *second sex*.

Selama ini perempuan Indonesia dicitra-kan sebagai kaum yang dikekang, dibatasi, lemah, dan tak berdaya. Kisah Kartini yang dipingat menyiratkan bahwa sejak dulu memang ada kesan bahwa masyarakat memang tidak pernah menginginkan perempuan menjadi ter-lalu mampu. Belum lagi adanya dikotomi an-

tara laki-laki dan perempuan tanpa disadari telah menyebabkan subordinasi perempuan oleh laki-laki. Akibat oposisi biner ini laki-laki dapat terekspose di sektor publik, sementara perempuan lebih banyak berkutat di sektor domestik.

Situasi yang membuat perempuan berada dalam keterbatasan sebenarnya tidak mematahkan perjuangan perempuan di bidang yang ditekuninya. Adik Kartini bernama Kardinah memiliki sumbangsih besar dengan mendirikan rumah sakit di Tegal. Rohana Kudus, perempuan Minang, berperan dalam memajukan pendidikan di Sumatera Barat. Tentu masih ada banyak pejuang dan sosok perempuan berjasa lainnya yang hingga kini masih jarang diungkap.

Kecenderungan sejarah yang sifatnya masih *androcentric* dan identik dengan kekuasaan, perang, politik, militer, dan sejenisnya justru semakin mengecilkan peran perempuan. Perempuan menjadi terpinggirkan dan hanya mendapat sedikit tempat dalam sejarah, bahkan hampir tidak disebut dalam beberapa peristiwa. Melacak jejak perempuan dalam Sejarah Indonesia memang sulit. Akan tetapi bukan berarti menghilangkan peran dan kepahlawanan perempuan. Patut disadari bahwa perempuan juga memiliki kontribusi bagi tegak majunya Republik ini. Selamat Hari Pahlawan. □ - c.

*) **Hendra Kurniawan MPd**,
Dosen Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

PENETAPAN Hari Pahlawan mengacu pada Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, tepat 70 tahun yang lalu. Ketika itu Sekutu mengeluarkan ultimatum yang meminta Indonesia menyerahkan senjata akibat terbunuhnya Brigjen Mallaby, pimpinan Tentara Sekutu di Surabaya. Penolakan terhadap ultimatum ini mengakibatkan terjadinya pertempuran besar yang digelorakan oleh Bung Tomo. Inilah pertempuran pertama pasca Proklamasi yang merupakan bentuk nyata tekad kolektif dalam membela Republik yang baru lahir.

Mereka yang berjuang dan gugur dalam peperangan berhak menyandang gelar pahlawan. Istilah pahlawan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *phala* yang berarti buah atau hasil. Pahlawan dianggap sebagai orang yang memiliki pahala atau jasa besar bagi bangsa dan negara. Pahlawan digambarkan sebagai sosok pemberani sekaligus pembela kebenaran. Dalam perkembangannya sekarang ini tak hanya para pejuang yang angkat senjata, mereka yang memiliki peranan menonjol dan berjasa bagi negara sesuai bidangnya masing-masing juga dapat dianugerahi gelar pahlawan.

Hingga kini dari sekitar 159 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, ternyata hanya terdapat 12 orang perempuan. Para srikandi bangsa ini yaitu Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Martha Christina Tiahahu, Maria Walanda Maramis, Nyai Hj Siti Walidah Ahmad Dahlan, Nyi Ageng Serang, Hj Rangkayo Rasuna Said, Hj Fatimah Siti Hartinah Soeharto, Hj Fatmawati Soekarno, dan Opu Daeng Risadju. Cukup mengejutkan karena ternyata jumlah perempuan pahlawan tak sampai 10% dari total jumlah yang diakui negara.

Dewasa ini seiring dengan irama Reformasi, begitu kuat perjuangan 30% keterwakilan perempuan dalam DPR. Demikian pula untuk dapat menjadi peserta pemilu maka dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus sekurang-kurangnya terdapat 30% perempuan. Bahkan dalam daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat sedikitnya 30% perempuan. Pendek kata, perem-